Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 11 Nomor 03, September 2026

PENGARUH PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN AKSES PERMODALAN TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PADA AHAD FESTIVAL KOTA LHOKSEUMAWE

Rizky Khairunna[1], Lianti[2], Diana[3]
[1,2] Politeknik Negeri Lhokseumawe
[1] rizkykhairunna04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local government role and capital access on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lhokseumawe City. The research method was conducted using multiple linear regression testing with primary data, and the sample obtained through non-probability sampling technique was 95 respondents. The respondents are MSME actors at Ahad Festival in Lhokseumawe City. Primary data were collected through questionnaires using Google Form, while secondary data were obtained from official documents of related institutions and BPS. The partial test results (t) show that the Local Government Role variable (X_1) has a positive and significant effect on MSME Development in Lhokseumawe City. The Capital Access variable (X_2) also has a positive and significant effect on MSME Development in Lhokseumawe City. Simultaneously (F test), it shows that the Local Government Role and Capital Access variables together have a positive and significant effect on MSME Development in Lhokseumawe City. In addition, the Adjusted R Square value is 0.690. This means that the local government role and capital access variables together are able to explain 69% of the variation in MSME development, and the remaining 31% is influenced by other factors outside this research model.

Keywords: *MSME Development, Local Government Role, Capital Access.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran pemerintah daerah dan akses permodalan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian regresi linerar berganda dengan menggunakan data primer, sampel yang diperoleh melalui teknik non-probability sampling adalah sebanyak 95 responden. Responden tersebut merupakan pelaku UMKM pada Ahad Festival di Kota Lhokseumawe. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan *Google Form*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga terkait dan BPS. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Peran Pemerintah Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Variabel Akses Permodalan (X_2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel Peran Pemerintah Daerah dan Akses Permodalan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,690. Artinya, variabel peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pengembangan UMKM sebesar

69%, dan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Pengembangan UMKM, Peran Pemerintah Daerah, Akses Permodalan.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik di negara maju maupun negara berkembang. UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Peran UMKM menjadi semakin penting karena sektor ini mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah dan menengah yang tidak sepenuhnya terserap oleh sektor formal. Oleh karena itu, keberadaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai pelengkap perekonomian nasional, tetapi juga sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu maupun kelompok masyarakat dengan skala usaha relatif kecil. UMKM umumnya memanfaatkan modal usaha yang terbatas, yaitu berkisar antara Rp50 juta hingga Rp300 juta. Dengan karakteristik tersebut, UMKM menjadi sektor yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Tujuan utama pengembangan UMKM adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi pelaku usaha. Dengan demikian, UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Upaya tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa UMKM memiliki ketahanan yang relatif tinggi terhadap tekanan dan guncangan ekonomi. Dibandingkan dengan usaha berskala besar, UMKM cenderung lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi

ekonomi. Pada saat terjadi krisis ekonomi, UMKM sering kali tetap mampu bertahan dan melanjutkan aktivitas usahanya. Hal ini menjadikan UMKM sebagai penyangga stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2023, Indonesia mempunyai 66 juta pelaku UMKM atau sekitar 99% dari total pelaku usaha. UMKM juga mampu menampung 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari kapasitas dunia usaha atau total tenaga kerja, dan menghimpun 60,4% dari total investasi. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penyelamat ekonomi rakyat, akan tetapi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi indonesia yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. UMKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal karena sebagian besar pelaku usahanya berasal dari masyarakat setempat dan memanfaatkan sumber daya lokal. Keberadaan UMKM di daerah diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, pengembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaku UMKM sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi permodalan, manajerial, maupun akses terhadap pasar. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan banyak UMKM belum mampu berkembang secara optimal dan memiliki daya saing yang tinggi.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM, peran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan usaha. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perumusan

kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Peran pemerintah daerah yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing UMKM di daerah.

Dalam konteks Kota Lhokseumawe, peran pemerintah daerah tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan dan program pembinaan, tetapi juga melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang secara langsung melibatkan pelaku UMKM, salah satunya adalah kegiatan "Ahad Festival". Ahad Festival merupakan program yang secara rutin dilaksanakan sebagai wadah promosi, pemasaran, serta pengembangan jaringan usaha bagi pelaku UMKM lokal. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk memasarkan produk, meningkatkan visibilitas usaha, serta berinteraksi langsung dengan konsumen.

Namun, dalam praktiknya peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Beberapa program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jangkauan program, kurangnya kesinambungan pembinaan, serta belum meratanya akses informasi bagi pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum memperoleh manfaat maksimal dari kebijakan dan program yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, perkembangan pelaksanaan program seperti Ahad Festival menunjukkan adanya progres dari tahun ke tahun. Jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi cenderung meningkat, variasi produk yang ditawarkan semakin beragam, serta antusiasme masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai berperan aktif dalam menciptakan ruang ekonomi yang inklusif bagi UMKM, meskipun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan (Sukraini et al., 2025) dengan judul "Pengaruh Modal Usaha, Karakteristik Wirausaha, dan Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM". Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa modal usaha dan peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, sedangkan karakteristik wirausaha tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, sehingga menegaskan pentingnya dukungan permodalan dan peran aktif pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM.

Menurut Hamami (2017), pemerintah merupakan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Gede Diva (2003) terdapat peran pemerintah yang efektif dalam pengembangan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Menurut (Ngakil & Kaukab, 2020) dengan adanya peran pemerintah terhadap UMKM maka akan memperlancar jalannya suatu usaha, sehingga akan mempengaruhi pada jumlah pendapatan yang didapat.

Selain peran pemerintah daerah, akses permodalan juga merupakan faktor yang menentukan tingkat pengembangan UMKM. Modal usaha dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas produksi, pengadaan bahan baku, serta pengembangan inovasi produk. Modal juga berperan dalam memperluaskan skala usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Tanpa dukungan permodalan yang memadai, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan UMKM dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Oleh sebab itu, UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Modal usaha merupakan suatu hal yang paling penting dalam menjalankan usaha. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya. Dengan adanya kemudahan akses permodalan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2024) dengan judul “Akses Pembiayaan UMKM dalam Pengembangan Usaha”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pembiayaan, meskipun telah tersedia skema pembiayaan dari pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan, tingginya persyaratan agunan, prosedur birokrasi yang rumit, serta suku bunga yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan akses pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berdampak pada terhambatnya pengembangan dan pertumbuhan UMKM.

Menurut (Haryanti, 2024) UMKM umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Menurut (Tambunan, 2012) modal merupakan faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan UMKM karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama kegiatan usaha. Hal ini diperkuat oleh Yuniarti (2024) yang menjelaskan bahwa rendahnya akses permodalan membuat banyak UMKM hanya bergantung pada modal pribadi yang terbatas, sehingga menghambat pengembangan usaha.

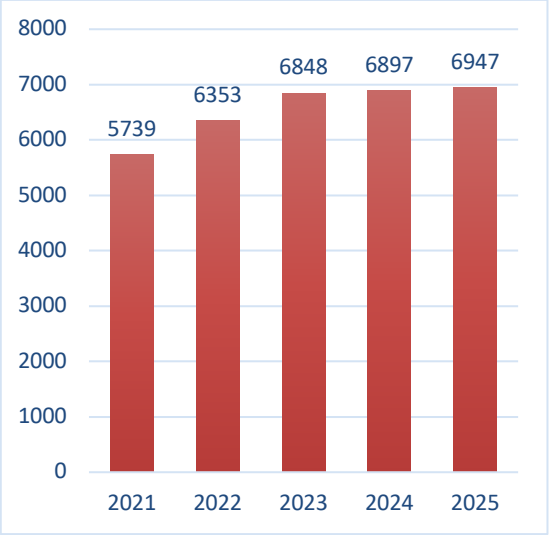
Dalam kenyataannya, banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain persyaratan administrasi yang dianggap rumit dan keterbatasan jaminan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM lebih memilih menggunakan modal sendiri atau sumber pembiayaan informal. Sumber pembiayaan tersebut umumnya memiliki jumlah yang terbatas dan berisiko tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Lhokseumawe mencapai 196.067 jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) menjadi salah satu solusi strategis dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup besar. Jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. UMKM di Kota Lhokseumawe pada dasarnya bergerak dalam 7 sektor usaha, seperti perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transpostasi, dan peternakan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM), jumlah UMKM terus meningkat secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir.

Secara khusus, sebagian UMKM di Kota Lhokseumawe yang tergabung dalam kegiatan Ahad Festival umumnya bergerak pada sektor kuliner, kerajinan, dan produk kreatif lokal. Fokus pada UMKM yang berpartisipasi dalam Ahad Festival menjadi penting karena kegiatan ini mencerminkan bentuk nyata intervensi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasaran produk serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.



Grafik 1.1 Jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe

Sumber: Disperindagkop dan UKM

Berdasarkan Grafik 1.1 tersebut, jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah UMKM tercatat sebanyak 5.739 unit, kemudian meningkat menjadi 6.353 unit pada tahun 2022, 6.848 unit pada tahun 2023, 6.897 unit pada tahun 2024, dan mencapai 6.947 unit pada tahun 2025. Secara keseluruhan terjadi peningkatan sebanyak 1.208 unit atau sekitar 21,05% selama lima tahun. Peningkatan ini menunjukkan

bahwa minat masyarakat untuk menjalankan usaha terus bertambah dan UMKM memiliki peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan kapasitas usaha. Masih terdapat pelaku UMKM, termasuk yang berpartisipasi dalam Ahad Festival Kota Lhokseumawe, yang menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas pengembangan usaha, serta belum optimalnya perluasan pemasaran produk. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Ahad Festival mampu memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat, belum seluruh pelaku usaha mengalami peningkatan kapasitas usaha secara signifikan.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah melalui program pembinaan, pendampingan, serta penyelenggaraan Ahad Festival perlu terus diperkuat dan didukung dengan kebijakan yang lebih komprehensif, khususnya dalam memperluas akses permodalan. Akses permodalan yang memadai akan membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan inovasi produk, dan memperluas usahanya. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dan akses permodalan diduga menjadi faktor yang memengaruhi pengembangan UMKM pada Ahad Festival Kota Lhokseumawe.

Masalah keterbatasan modal dan kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah masih menjadi persoalan yang cukup dominan. Tidak semua pelaku usaha UMKM mampu memanfaatkan fasilitas dan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Sebagian besar dari pelaku usaha tersebut tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan modal tersebut, kurangnya memahami administrasi keuangan, dan masih kurangnya ilmu dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluaskan target pasar. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pemberian akses modal bagi pelaku UMKM.

Kehadiran pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sebatas pada

pemberian bantuan finansial, akan tetapi juga mencakup dukungan non-finansial. Seperti dengan adanya pelatihan manajemen usaha, pendampingan pemasaran, dan peningkatan kualitas produk. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang proaktif terhapa pelaku UMKM, terutama dalam hal mudahnya peizinan, promosi produk lokal, dan fasilitas kerja sama dengan sektor swasta. Dengan adanya dukungan yang memadai, pelaku usaha di Kota Lhokseumawe akan lebih siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Kemudahan permodalan dapat menjadi faktor yang sangat penting bagi pelaku usaha. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat mendorong meningkatnya kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Dalam konteks ini, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal bergulir perlu diperluaskan jangkauannya hingga ke tingkat mikro agar seluruh pelaku UMKM dapat merasakan manfaatnya.

Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kemudahan akses permodalan pelatihan, serta pengembangan jaringan pemasaran bagi seluruh UMKM menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah diharapkan dapat menyalurkan ide dan kebijakan yang nyata bagi UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan dengan impor yang semakin banyak beredar di pasar domestik. Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah, UMKM dapat lebih dikenal masyarakat luas serta meningkatkan nilai jual produk lokal agar mampu bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri. UMKM yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut dan dikelola baik oleh pemerintah setempat dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Fenomena empiris di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan jumlah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas usaha, produktivitas, serta daya saing pelaku

UMKM. Selain itu, masih terdapat kendala dalam akses permodalan serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pendampingan UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran pemerintah daerah dan ketersediaan akses permodalan yang secara teoritis berpengaruh terhadap pengembangan UMKM, dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya lebih banyak dilakukan pada wilayah perkotaan besar, sementara penelitian yang secara spesifik meneliti UMKM di Kota Lhokseumawe masih relatif terbatas. Sementara itu, sebagian penelitian sebelumnya cenderung menguji faktor peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap perkembangan UMKM, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian tersebut, UMKM pada Ahad Festival dipilih sebagai objek penelitian karena merepresentasikan peran nyata pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM serta menunjukkan progres setiap tahunnya, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas usaha dan akses permodalan yang optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Peran Pemerintah Daerah dan Akses Permodalan terhadap Pengembangan UMKM.

B. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh peran pemerintah daerah dan akses permodalan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari peran pemerintah daerah (X_1) dan akses permodalan (X_2), sedangkan variabel terikat adalah pengembangan UMKM (Y). Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara rutin dan mengikuti kegiatan Ahad Festival di Kota Lhokseumawe, khususnya pelaku UMKM sektor kuliner. UMKM yang menjalankan usaha secara rutin merupakan pelaku usaha yang

melakukan kegiatan usahanya secara berkelanjutan, sedangkan UMKM Ahad Festival merupakan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan Ahad Festival sebagai salah satu tempat untuk menjalankan atau memasarkan usahanya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari Bank Indonesia, Bank Aceh, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut digunakan sebagai pendukung dalam menggambarkan kondisi UMKM, pembinaan, akses permodalan, serta dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1.1 Pengaruh Peran Pemerintah Daerah Secara Parsial Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Lhokseumawe

Uji parsial (t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Dalam penelitian ini, nilai t-tabel diperoleh dari derajat kebebasan (df) yaitu 95 – 2 – 1 = 92 pada taraf signifikansi 5%, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,66159. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji parsial (t), variabel peran pemerintah daerah (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 6,364 > t-tabel 1,66159 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat pengembangan UMKM. Pengaruh positif terjadi karena pemerintah daerah mampu memberikan berbagai bentuk dukungan yang dibutuhkan pelaku UMKM. Dukungan tersebut mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha sehingga UMKM dapat berkembang dengan

lebih baik.

Pemerintah dalam memberikan modal pastinya memberikan persyaratan, seperti memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memiliki administrasi keuangan sederhana. Persyaratan ini bertujuan agar bantuan permodalan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan, mengingat modal tersebut diberikan bukan untuk pemula, melainkan sebagai tambahan modal dari pemerintah daerah guna memperbesar skala usaha mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala bagi sebagian UMKM yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Meskipun demikian, bagi UMKM yang mampu memenuhi persyaratan, bantuan permodalan dari pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengembangan usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah merupakan faktor yang dapat mendorong pengembangan UMKM. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, regulator, motivator, dan katalisator dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM. Melalui penyediaan akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, promosi produk, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sukraini et al. (2025) yang menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Penelitian Rois et al. (2024) juga menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik melalui program-program pengembangan UMKM. Penelitian Iqnatia et al. (2021) juga membuktikan bahwa peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM. Selain itu, Salam dan Prathama (2022) menyatakan bahwa pemerintah daerah berperan baik dalam pengembangan UMKM.

Secara praktik, pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe merasakan manfaat dari peran pemerintah daerah

melalui kemudahan perizinan usaha, penyediaan fasilitas usaha, pelatihan dan bimbingan, kegiatan promosi, serta dukungan koordinasi dalam pelaksanaan usaha. Dukungan tersebut membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet usaha, jumlah produksi, kualitas produk, serta menjaga keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, semakin baik peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, katalisator, dan koordinator, maka semakin tinggi pula tingkat pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.1.2 Pengaruh Akses Permodalan Secara Parsial Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Lhokseumawe

Uji parsial (t) pada variabel akses permodalan dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung terhadap nilai t-tabel sebesar 1,66159 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar 92. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akses permodalan secara individu memiliki pengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil uji parsial (t), variabel akses permodalan (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,036 > t-tabel 1,66159 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah pelaku UMKM memperoleh akses permodalan, maka semakin tinggi tingkat pengembangan usahanya. Pengaruh positif tersebut terjadi karena modal merupakan sumber daya penting dalam pengembangan usaha. Kemudahan memperoleh modal memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan usaha, memperluas pemasaran, dan mengembangkan produk sehingga dapat mendorong perkembangan UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa akses permodalan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pengembangan UMKM. Kemudahan memperoleh modal, tersedianya berbagai sumber pembiayaan, kecukupan modal yang diperoleh, tingkat bunga dan biaya pinjaman yang terjangkau, serta jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kemampuan usaha dapat membantu

pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan akses permodalan yang baik, pelaku usaha memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sugita dan Ekayani (2022) yang menunjukkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Selanjutnya, penelitian Yuniarti (2024) juga menemukan bahwa akses pembiayaan memiliki peran penting dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa akses permodalan dapat mendorong pengembangan UMKM.

Secara praktik, kemudahan akses permodalan yang dirasakan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe terlihat dari kemudahan memperoleh modal, tersedianya berbagai sumber pembiayaan, kecukupan modal yang diterima, biaya pinjaman yang relatif terjangkau, serta jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kemampuan usaha. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku UMKM memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usaha, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Akses permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.1.3 Pengaruh Peran Pemerintah Daerah dan Akses Permodalan Secara Simultan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Lhokseumawe

Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, nilai F-tabel diperoleh berdasarkan derajat kebebasan pembilang (df1) sebesar 2 dan derajat kebebasan penyebut (df2) sebesar 92, sehingga diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,10. Apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai F-hitung sebesar

105,797 > F-tabel 3,10 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak, karena mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan.

Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,690 atau 69%. Artinya, variabel peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pengembangan UMKM sebesar 69%, sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat, meskipun terdapat faktor lain yang turut memengaruhi pengembangan UMKM.

Secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Peran pemerintah daerah melalui kebijakan dan perizinan usaha, penyediaan fasilitas usaha, pelatihan dan bimbingan, promosi usaha, serta koordinasi kegiatan usaha akan lebih efektif apabila didukung oleh kemudahan memperoleh modal, tersedianya sumber pembiayaan, kecukupan modal, biaya pinjaman yang terjangkau, dan jangka waktu pengembalian yang sesuai. Kombinasi kedua variabel ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan finansial dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan akses permodalan menjadi sumber daya utama yang memungkinkan UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan meningkatkan daya saingnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu.

Sukraini et al. (2025) menemukan bahwa peran pemerintah dan modal usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, Sugita & Ekayani (2022) juga menyatakan bahwa akses permodalan bersama dengan faktor lainnya memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, kombinasi antara dukungan pemerintah dan ketersediaan modal merupakan faktor penting dalam pengembangan UMKM.

Kondisi UMKM Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pengembangan usaha akan lebih optimal apabila peran pemerintah daerah dan akses permodalan berjalan secara bersamaan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan, fasilitas usaha, pelatihan, promosi, dan koordinasi kegiatan usaha yang didukung oleh kemudahan memperoleh modal serta ketersediaan sumber pembiayaan membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Kombinasi kedua faktor tersebut mendorong peningkatan omzet, jumlah produksi, perluasan usaha, peningkatan kualitas dan inovasi produk, serta keberlanjutan usaha. Sinergi antara peran pemerintah daerah dan akses permodalan menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menganai Pengaruh Peran Pemerintah Daerah dan Akses Permodalan terhadap Pengembangan UMKM, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: Secara parsial, variabel peran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Secara parsial, variabel akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Secara simultan, variabel peran pemerintah daerah dan akses permodalan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe

DAFTAR PUSTAKA

Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika*

Ekonomi Syariah, *9*(1), 73–84.

Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *1*(1), 120–142.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. BPS.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8–21.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Safitri, D., & Rusdin, R. B. (2024). The role of the Palu City Government in empowering UMKM in Palu City. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, *1*(1), 137–153.

Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(2), 137–143.

Sugita, I. K. D. N., & Ekayani, N. N. S. (2022). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan akses permodalan terhadap keberlanjutan umkm pada bidang fashion di kota denpasar. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, *8*(1), 117–125.

Sukraini, J., Putri, R. D., & Fadilla, S. (2025). Pengaruh modal usaha, karakteristik wirausaha, peran pemerintah terhadap perkembangan UMKM. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, *6*(4).

Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis-riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, *29*(1), 1–10.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).